

Analisis Model *Co-Production* (Elinor Ostrom) dalam Pengelolaan Fasilitas Publik di Taman TVRI Kota Palembang

Elivia Pasma Putri¹, Ade Maulidya²

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir, Indonesia

Email: ¹07011182328112@student.unsri.ac.id, ²ade.maulidya@fisip.unsri.ac.id

Abstrak

Taman Publik POM IX (Taman TVRI) di Kota Palembang merupakan ruang terbuka hijau publik yang dapat diakses secara gratis dengan fasilitas olahraga, area bermain anak, dan gazebo. Namun, fasilitas publik yang digunakan untuk menghadapi masalah serius terkait perawatan, kebersihan, keamanan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kuantitatif sederhana dengan skala likert 1–4 terhadap sejumlah responden dengan kriteria tertentu, menggabungkan data primer dari kuesioner berbasis empat dimensi *teori co-production* Elinor Ostrom dan observasi lapangan serta data sekunder dengan analisis pada informasi berita, media sosial dan penelitian terdahulu. Hasil menunjukkan fasilitas Taman TVRI Kota Palembang banyak rusak dan berkarat, terjadi vandalisme serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hasil survei dengan fokus pengelolaan melalui kontribusi swasta dengan CSR menunjukan minim respon sebesar (67,8% responden menilai tidak ada peran nyata), meskipun 71% mendukung model pengelolaan bersama pemerintah-masyarakat. Berdasarkan hasil yang didapat Taman TVRI memerlukan perbaikan intensif dan kolaborasi multipihak untuk meningkatkan kenyamanan serta keberlanjutan. Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemeliharaan fasilitas publik dapat berkolaborasi dalam mendukung alokasi anggaran rutin untuk perbaikan, jadwal pemeliharaan berkala, penguatan kebijakan insentif CSR, serta program partisipatif seperti gotong royong bulanan, musyawarah perencanaan, dan penghargaan bagi komunitas aktif guna mewujudkan *co-production* ideal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ruang Publik, Kepuasan Masyarakat, *Co-Production*, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

POM IX Public Park (TVRI Park) in Palembang City is a public green open space that can be accessed for free with sports facilities, children's play areas, and gazebos. But, public facilities used to face serious problems related to maintenance, cleanliness, security, and accessibility for people with disabilities. This study uses a simple quantitative Community Satisfaction Survey (SKM) method with a Likert scale of 1–4 to a number of respondents with certain criteria, combining primary data from a questionnaire based on Elinor Ostrom's four dimensions of co-production theory and field observations as well as secondary data with analysis of news information, social media and previous research. The results show that the facilities of TVRI Park in Palembang City are damaged and rusty, vandalism occurs and low community participation. The results of the survey with a focus on management through private contributions with CSR showed minimal response (67.8% of respondents considered there was no real role), although 71% supported the government-community joint management model. Based on the results obtained, TVRI Park requires intensive improvements and multi-party collaboration to improve comfort and sustainability. The government's role in addressing the maintenance issues of public facilities can be collaborative in supporting routine budget allocations for repairs, periodic maintenance schedules, strengthening CSR incentive policies, as well as participatory programs such as monthly mutual cooperation, planning meetings, and awards for active communities to realize ideal co-production that is inclusive and sustainable.

Keywords: Public Space, Community Satisfaction, *Co-Production*, Community Participation.

PENDAHULUAN

Fasilitas publik berupa ruang terbuka hijau (RTH) seperti taman kota memainkan peran penting dalam kehidupan perkotaan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan, taman kota memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara dan menyediakan fasilitas publik yang sehat dan terjangkau (Arung *et al.*, 2025). Tidak hanya itu, keberadaan taman kota juga sangat mendukung kebutuhan masyarakat perkotaan mulai dari interaksi sosial, rekreasi, olahraga hingga aktivitas komunitas sekitar. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, pemerintah kota wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik minimal 20% dari total Ruang Terbuka Hijau yang sehat, layak, dan dapat menunjang kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (UU Nomor 26 Tahun 2007).

Salah satu taman publik yang cukup dikenal masyarakat Kota Palembang adalah Taman Publik Pom IX atau yang sering disebut juga sebagai Taman TVRI Palembang karena letaknya di depan kantor TVRI Sumatera Selatan. Taman ini dapat diakses oleh masyarakat tanpa biaya masuk, sehingga menjadi ruang rekreasi yang terbuka bagi semua kalangan. Fasilitas yang tersedia antara lain alat olahraga sederhana seperti air walker dan tomkin, area bermain anak-anak, lapangan bulu tangkis serta pondok gazebo. Adanya fasilitas tersebut, taman ini dapat menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat, termasuk mahasiswa untuk berolahraga, berkumpul, dan mengadakan kegiatan sosial.

Akan tetapi, meski memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar, keberadaan fasilitas publik tidak selalu berjalan mulus terutama dalam praktik pengelolaannya (Madu & Dimmera, 2023). Tantangan utama yang sering dihadapi adalah perawatan dan pemeliharaan taman. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa sebagian fasilitas publik di Taman TVRI Kota Palembang masih ditemukan dalam kondisi kurang terawat, baik dari sisi kebersihan, kualitas sarana, maupun keamanan. Kondisi ini diperparah dengan maraknya kasus vandalisme di media sosial mengenai taman tersebut (tribunnews.com, 2025). Kerusakan fasilitas dan maraknya vandalisme bukanlah fenomena biasa, melainkan gejala dari kegagalan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan tata ruang wilayah baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pengguna dan pengawas, serta sektor swasta sebagai penyokong sumber daya. Tata kelola yang buruk apabila terus dibiarkan akan berdampak pada tingkat kenyamanan masyarakat, menurunkan partisipasi masyarakat serta menghambat pembangunan berkelanjutan bagi wilayah setempat (Prasetyo, 2023).

Padahal, menurut teori *co-production* Elinor Ostrom (1996) menegaskan bahwa pengelolaan ruang publik yang berhasil harus memerlukan keterlibatan aktif pengguna dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan sanksi secara berkala (Robert *et al.*, 2021). Berpacu pada teori ini, permasalahan yang terjadi di Taman TVRI Kota Palembang perlu untuk dilakukannya pengelolaan yang lebih optimal dengan berdasarkan empat dimensi utama yaitu kondisi ruang publik, partisipasi masyarakat, peran aktor kunci (pemerintah dan swasta), serta model *co-production* ideal. Tujuannya, agar pengelolaan yang dilaksanakan dapat berpacu pada perumusan kebijakan dengan strategi kolaboratif yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena sangat pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai gambaran nyata Taman TVRI di Kota Palembang, khususnya dalam perspektif ilmu administrasi publik, tim penulis menginisiasi penelitian ini dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kondisi pengelolaan taman kota dengan fokus pada teori *co-production* Elinor Ostrom, memberikan gambaran nyata terkait persepsi masyarakat terhadap fasilitas ruang publik serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

METODE

Artikel yang ditulis oleh penulis menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik atau produk tertentu melalui pengumpulan data secara langsung dari responden (Diana & Wijayanti, 2022). Sementara menurut Sugiyono (2016: 7), metode kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan filsafat positivisme dan diterapkan untuk meneliti sampel serta populasi tertentu, dengan menyajikan data dalam bentuk angka (Siroj *et al.*, 2024). Penelitian kuantitatif sederhana melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan skala Likert 1-4 dipilih agar menghindari kecenderungan memilih nilai tengah (netral) sehingga responden memberikan penilaian lebih tegas dan mengurangi bias.

Pengumpulan data pada penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui kegiatan di lapangan, berupa hasil penyebaran kuisioner secara langsung dengan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria responden atau pertimbangan tertentu, bukan secara acak (Sugiyono, 2017). Kriteria responden ini diantaranya, usia 17-45 tahun dengan minimal

2 kali selama seminggu mengunjungi taman. Penentuan responden ditentukan dengan minimum 30 responden berdasarkan *Central Limit Theorem* (Mendenhall dan Beaver, 1992 dalam Aziza, 2006). Sementara itu, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan dan dikumpulkan peneliti selama proses penelitian (Nur & Saihu, 2024). Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung untuk melengkapi kebutuhan informasi dalam penelitian (Nashrullah *et al.*, 2023). Penulis melakukan analisis data dengan melihat hasil persentase dari survei kepuasan masyarakat melalui skala linkert 1-4. Integrasi dilakukan melalui penyajian data hasil skor SKM kemudian dihubungkan dengan empat dimensi Elinor Ostrom (1996), yaitu kondisi ruang publik, partisipasi masyarakat, peran aktor kunci (pemerintah dan swasta), serta model *co-production* ideal lalu diperjelas dengan temuan dokumen sekunder berupa laporan media untuk mengidentifikasi kesenjangan antara persepsi masyarakat dan realitas tata kelola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis melalui tinjauan langsung di lapangan dan penyebaran kuisioner dalam melihat survei kepuasan masyarakat (SKM). Terdapat beberapa temuan hasil di Taman TVRI Kota Palembang oleh penulis baik dalam bentuk analisis teori, perspektif masyarakat serta penjabaran hasil dengan berlandaskan teori *co-production* Elinor Ostrom (1996). Adapun temuan-temuan tersebut dijelaskan berikut.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1. Kondisi Taman TVRI Kota Palembang

Taman Publik POM IX merupakan salah satu fasilitas ruang terbuka publik yang terletak di depan TVRI Sumatera Selatan dan dekat dengan Palembang Square (PS) Mall. Lokasi taman ini tepatnya berada di Jl. POM IX, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126. Taman ini merupakan salah satu taman favorit warga karena memungut biaya tiket masuk, sehingga bisa dinikmati secara gratis oleh semua kalangan. Taman Publik Pom IX menawarkan berbagai fasilitas olahraga yang dapat digunakan secara bebas. Salah satu yang menonjol adalah lapangan bulu tangkis, yang sering digunakan oleh pengunjung untuk berolahraga. Tidak hanya itu, taman ini juga menyediakan berbagai alat olahraga seperti air walker dan tomkin, serta area bermain anak-anak yang lengkap dengan perosotan, rumah-rumahan, dan ayunan. Di tengah taman, terdapat tugu Adipura yang menjadi ikon taman ini. Tugu tersebut merupakan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia untuk kota Palembang sebagai kota metropolitan terbersih pada tahun 2011-2013. Area sekitar tugu sering digunakan pengunjung untuk duduk-duduk santai sambil menikmati suasana taman yang asri. Taman ini sangat cocok bagi semua kalangan digunakan untuk menikmati suasana sore hari kota Palembang.

Selain fasilitas tersedia juga aktivitas melukis dengan harga Rp15.000. Aktivitas ini tidak hanya menghibur tetapi juga edukatif bagi anak-anak. Selain area bermain dan olahraga, taman ini dilengkapi dengan gazebo-gazebo dan bangku-bangku yang tersebar di berbagai sudut. Pengunjung dapat bersantai sambil menikmati pemandangan taman yang indah ditemani dengan beberapa penjual makanan di sekitar taman tersebut. Untuk kemudahan, tersedia area parkir dengan tarif yang terjangkau, yaitu sekitar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil.

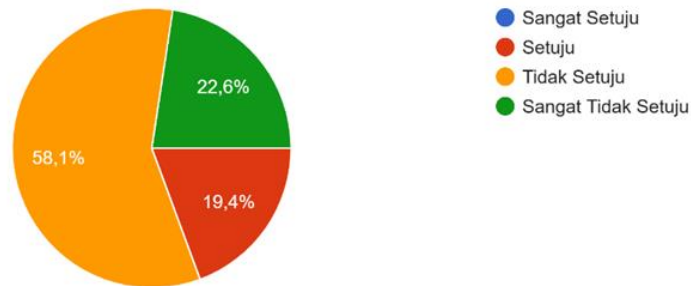
Analisis Persepsi Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim penulis pada minggu, 28 Agustus di Taman TVRI (Kampus), terdapat sejumlah temuan menurut hasil penyebaran kuisioner dan pengamatan melalui observasi. Analisis dilakukan dengan berdasarkan pada Teori *Co-Production* dari Elinor Ostrom (1996) untuk melihat bagaimana pengelolaan ruang publik yang ada di taman tersebut. Akan tetapi, sebelum

menganalisis hasil dari Teori Elinor Ostrom, maka penulis memberikan gambaran persepsi masyarakat terhadap keberadaan Taman TVRI Kota Palembang sebagai berikut.

Saya puas dengan kualitas ruang publik yang ada di Palembang

31 jawaban



Gambar 2. Hasil visualisasi persepsi masyarakat pada Taman TVRI Palembang

Berdasarkan pada hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan mayoritas diisi oleh kurang lebih 51,6% mahasiswa telah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas ruang publik di Kota Palembang masih tergolong rendah. Dari 31 responden, sebanyak 58,1% menyatakan *tidak setuju* dan 22,6% *sangat tidak setuju* dengan kualitas ruang publik yang ada. Sementara hanya 19,4% responden yang menyatakan *setuju*, dan tidak ada yang menyatakan *sangat setuju*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa ruang publik di Palembang belum mampu memberikan kenyamanan dan kualitas yang diharapkan. Rendahnya tingkat kepuasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perawatan fasilitas, kebersihan yang tidak terjaga, keterbatasan sarana pendukung, serta minimnya kegiatan yang menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik secara aktif (Marsela *et al.*, 2025).

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemanfaatan ruang publik di Kota Palembang belum optimal dan masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, baik melalui peningkatan kualitas fasilitas, perencanaan yang lebih partisipatif, maupun pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan. Pemeliharaan fasilitas publik yang efektif akan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman, sehingga meningkatkan kualitas hidup sehari-hari warga. Sebaliknya, apabila terjadinya kegagalan dalam pemeliharaan fasilitas publik justru mencerminkan kegagalan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata ruang kota yang berkelanjutan (Rochmah & Rosy, 2022).

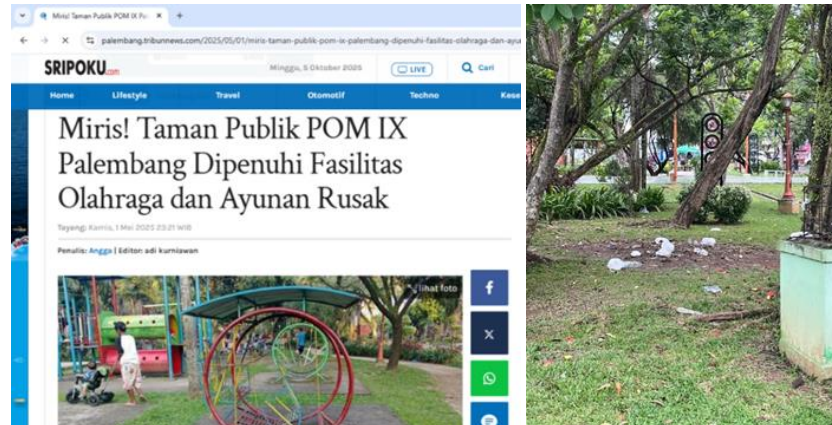
Temuan Peneliti

Hasil observasi penulis, dilakukan dengan mengacu pada Teori *Co-Production* dari Elinor Ostrom (1970-an) dan pengembangannya oleh Brandsen & Pestoff (2006), Brandsen, Steen & Verschuere (2018). *Co-production* adalah proses di mana input yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa disumbangkan oleh individu yang tidak dalam organisasi yang sama. Bagi Ostrom (1996), *co-production* itu merupakan sebuah pendekatan untuk mendobrak kesenjangan besar. *My own approach to breaching the great divide utilizes the concept of "coproduction."* Pendekatan ini mengartikan bahkan pentingnya kolaborasi antara penyedia layanan dan pengguna atau dikenal dengan layanan, *co-creation* di mana penerima terlibat dalam berbagai tahapan proses, termasuk perencanaan, desain, penyampaian dan audit layanan publik (Boyle, Clarke dan Burns 2006a; Needham dan Carr, 2009).

Definisi lainnya juga disampaikan oleh (Wellways 2019) yang mengatakan bahwa *co-production* adalah hubungan di mana para profesional dan warga negara berbagi kekuatan untuk merencanakan dan memberikan dukungan bersama, mengakui bahwa kedua pasangan memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas hidup orang dan komunitas (Slay dan Stephens, 2013). Lain halnya yang disampaikan oleh *Governance International*, bahwa ide dari *co-production*, "*It is about providing public services with people, not just for people. Clearly, people-powered services imply new forms of cocommissioning* (perencanaan bersama), *co-design* (merancang bersama), *co-delivering* and *co-assessing* public services." Ini tentang menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat, bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan format baru yaitu *co-commissioning* (perencanaan bersama), *co-design* (merancang bersama), *co-delivering*, dan *co-assessing* layanan publik).

Berdasarkan pada pendapat ahli tersebut, hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dibangun atas 4 dimensi utama dari teori *Co-Production* dari Elinor Ostrom yang mencakup kondisi ruang public, partisipasi masyarakat, peran actor kunci (pemerintah dan swasta) dan *model Co Production Ideal* dan sebagai berikut.

Kondisi Ruang Publik (fasilitas, kebersihan, keamanan, aksesibilitas)



Gambar 3. Kondisi ruang publik Taman TVRI

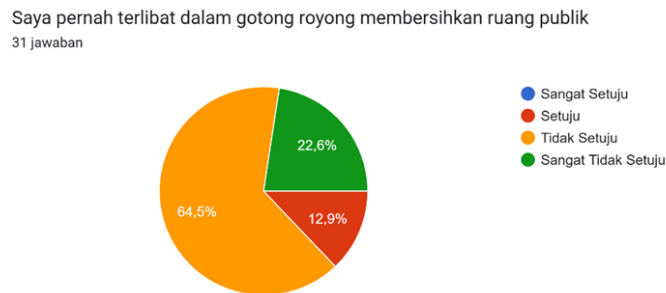
Berdasarkan pada temuan penulis di lapangan, taman POM IX (TVRI Kampus) memiliki berbagai fasilitas yang kurang memadai. Berdasarkan informasi media yang diambil melalui laman berita SRIPOKU.com, ditemui bahwa banyak fasilitas yang kurang terawat seperti keramik gazebo yang sudah retak, cat yang karatan, serta beberapa lampu yang sudah tidak berfungsi. Beberapa fasilitas olahraga (*Gym Outdoor*) di taman tersebut tampak rusak dan kehilangan bagian penahannya. Bangku-bangku di taman juga tampak usang, dengan besi yang sudah berkarat dan baut yang longgar. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan pengguna, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa pengelolaan fasilitas umum kurang diperhatikan. Selain itu, sejumlah ayunan juga kehilangan pijakan besinya, menyebabkan tempat duduk ayunan menyatu dan sangat berisiko bagi anak-anak yang menaikinya. Lebih parahnya lagi, berita yang terdapat pada laman Tribun.com, Taman Publik POM IX atau lebih dikenal dengan taman TVRI di jalan POM IX, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang pernah viral karena menjadi sasaran pelaku vandalisme. Aksi vandalisme yang terjadi di taman Publik POM IX, membuat masyarakat resah dan mengganggu pemandangan. Para pengunjung yang hendak menikmati sore di taman POM IX yang sejuk dan dipenuhi hembusan angin merasa cukup terganggu dengan coretan dan gambar yang terdapat dipanggung bertuliskan "PALEMBANG" tersebut. Hal ini membuat para pengunjung yang hendak berfoto, dengan latar belakang tulisan PALEMBANG di panggung tersebut mengurungkan niatnya karena terlihat tulisan dan gambar yang mengganggu.

Berdasarkan pada informasi yang ditemukan tersebut telah menandakan bahwa Taman Publik POM IX kurang mengalami perawatan dengan baik sehingga mengakibatkan kurangnya kenyamanan bagi para pengunjung. Jika kita analisis menggunakan model *Co-production*, realitas di taman TVRI Kota Palembang telah menunjukkan ketidakseimbangan peran, di mana kontribusi pemerintah terbatas pada pembangunan awal tanpa pemantauan lanjutan, sementara partisipasi masyarakat gagal mencegah degradasi akibat kurangnya kesadaran kepemilikan bersama. Kondisi ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi bahwa proses *co-production* di Palembang, khususnya di Taman TVRI Kota Palembang belum matang, di mana kondisi ruang publik yang mencakup aspek fisik, keamanan, dan kenyamanan tidak terjaga karena kurangnya mekanisme pengelolaan fasilitas publik yang berkelanjutan. Akibatnya, Taman TVRI bukan lagi simbol kebutuhan masyarakat kota, melainkan cerminan bagaimana *co-production* yang lemah sehingga memperburuk kondisi ruang publik.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pada teori *Co-Production* dari Elinor Ostrom (1970-an) mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan, kegiatan sosial serta pengawasan. Selama proses pengamatan berlangsung, tim penulis mengamati di Taman POM IX (Taman TVRI Kampus) ditemukan bahwa hanya terdapat aktivitas bermain anak-anak serta beberapa remaja yang jogging. Sementara aktivitas komunitas seperti pojok membaca, kerja bakti bersama tidak ditemukan di area tersebut. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat dan rasa memiliki terhadap taman tersebut sangat rendah. Berdasarkan hasil survei terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemeliharaan

serta kegiatan pengawasan terhadap taman tersebut hanya sebesar 12,9% responden yang menyatakan setuju. Sementara lebih dari 80% dari 31 Responden memberikan respon negatif (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Penjelasan lebih lanjut terdapat pada diagram di bawah ini :



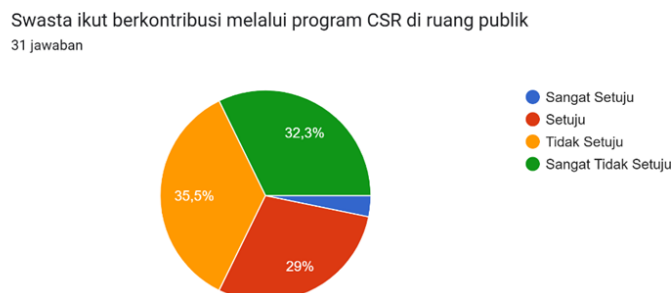
Gambar 4. Partisipasi Masyarakat

Penulis mengambil contoh partisipasi masyarakat dalam aktivitas gotong royong. Gambar diagram lingkaran tersebut menampilkan hasil survei dari 31 responden terhadap pernyataan “*Saya pernah terlibat dalam gotong royong membersihkan ruang publik.*” Berdasarkan data, terlihat bahwa mayoritas responden, yaitu 64,5%, menjawab tidak setuju, yang berarti sebagian besar masyarakat belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di ruang publik. Selain itu, 22,6% responden menyatakan sangat tidak setuju, mempertegas bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan bersama masih sangat rendah. Hanya 12,9% responden yang menjawab setuju, menandakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan gotong royong di lingkungan publik. Tidak ada satu pun responden yang memilih “sangat setuju”, yang menunjukkan kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial semacam ini. Berdasarkan pada presentasi jawaban, angka 12,9% responden yang hanya menjawab setuju membuktikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas publik terutama di Taman Kota TVRI ini masih rendah terutama dalam kesadaran menjaga serta merawat lingkungan publik mereka.

Partisipasi masyarakat sendiri dalam hal ini dilihat berdasarkan pada empat aspek utama, yaitu perencanaan, pemeliharaan, kegiatan, dan pengawasan, yang masing-masing berperan dalam mewujudkan tata kelola ruang publik yang berkelanjutan. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman TVRI Kota Palembang dapat disebabkan karena beberapa hambatan. Misalnya saja, jika dilihat pada tahap perencanaan, warga sering hanya menjadi pengguna pasif tanpa dilibatkan sejak awal dalam menentukan prioritas, desain, atau jadwal kegiatan. Padahal, pelibatan melalui musyawarah atau forum publik sejak dini dapat menumbuhkan rasa memiliki yang mendorong partisipasi aktif (Aiyub *et al.*, 2025). Pada aspek pemeliharaan, survei menunjukkan minimnya partisipasi dalam gotong royong, sehingga taman rawan rusak dan kotor. Dalam kegiatan sosial, masyarakat belum banyak terlibat dalam kerja bakti, penghijauan, atau edukasi lingkungan, padahal hal ini penting untuk memperkuat interaksi sosial dan tanggung jawab bersama sehingga pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dalam mendukung keterlibatan aktif masyarakat. Terakhir, pada tahap pengawasan, lemahnya kontrol sosial membuat kerusakan fasilitas, vandalisme, dan sampah sulit terdeteksi oleh karena itu perlu adanya keterlibatan warga dalam pemantauan akan mendorong inisiatif pelaporan dan tindakan langsung jika rasa tanggung jawab telah tertanam.

Peran Aktor Kunci

Penulis mengambil fokus bahasan pada bagaimana peran pemerintah dan swasta dalam memberikan dukungan kebijakan, fasilitas, sumber daya, serta CSR. Apabila kita analisis melalui diagram hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) peran Pemerintah & Swasta dalam dukungan kebijakan, fasilitas, sumber daya dan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sebagai berikut.



Gambar 5. Peran aktor kunci

Gambar tersebut menunjukkan hasil survei terhadap pernyataan “*Swasta ikut berkontribusi melalui program CSR di ruang publik*” yang diikuti oleh 31 responden. Berdasarkan diagram lingkaran, terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan negatif terhadap peran sektor swasta dalam mendukung ruang publik. Sebanyak 35,5% responden menjawab Tidak Setuju dan 32,3% menjawab Sangat Tidak Setuju, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kontribusi pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di ruang publik masih sangat rendah. Sementara itu, 29% responden Setuju, dan hanya 3,2% yang Sangat Setuju, yang berarti hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan adanya keterlibatan pihak swasta secara nyata di ruang publik, termasuk di Taman Kota TVRI.

Jika dikaitkan dengan kolaborasi antar *stakeholder*, khususnya pemerintah dan swasta, hasil survei ini memberikan gambaran penting bahwa kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas publik belum optimal. Angka 35,5% responden menyatakan Tidak Setuju dan 32,3% Sangat Tidak Setuju mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kontribusi perusahaan dalam pemeliharaan dan pengembangan ruang terbuka hijau ini. Hal ini tidak hanya terlihat dari kondisi taman yang sering dikeluhkan akibat fasilitas rusak, tumpukan sampah, dan kurangnya perawatan berkelanjutan, tetapi juga dapat dihubungkan langsung dengan kegagalan pemerintah daerah dan pusat dalam mengimplementasikan kebijakan insentif CSR yang efektif. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74) mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial, implementasinya sering terhambat oleh kurangnya regulasi pelaksanaan yang jelas, defisit sumber daya institusional, serta disfungsi komunikasi antar-stakeholder, sehingga insentif pajak seperti *deductible expense* untuk program CSR tidak mendorong partisipasi swasta secara optimal (Fahham, 2017).

Jika kita lihat pada gambaran nyata Taman TVRI Kota Palembang, kegagalan ini semakin nyata karena jangkauan CSR belum merata, di mana perusahaan swasta cenderung memprioritaskan program yang bersifat seremonial daripada investasi jangka panjang seperti revitalisasi taman kota, akibat minimnya pemantauan dan sanksi dari pemerintah. Akibatnya, beban pengelolaan Taman TVRI jatuh sepenuhnya pada anggaran publik yang terbatas, memperburuk degradasi fasilitas dan menurunkan kualitas hidup warga sekitar. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu memperkuat mekanisme insentif melalui kolaborasi publik-swasta yang lebih terstruktur, seperti program adopsi taman berbasis CSR dengan target kinerja yang terukur, guna memanfaatkan potensi swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan kolaboratif, menyediakan wadah komunikasi antara pihak swasta dan masyarakat, serta memastikan bahwa program CSR benar-benar diarahkan untuk mendukung pemeliharaan, perbaikan, dan aktivitas sosial di taman kota. Sementara itu, perusahaan perlu lebih proaktif dalam menjalankan CSR yang relevan dengan kebutuhan publik dan melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari proses. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta, taman publik, diharapkan Taman Kota TVRI dapat berkembang menjadi ruang terbuka hijau yang lebih fungsional, bersih, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi simbol keberhasilan kemitraan antara aktor-aktor kunci dalam pembangunan perkotaan yang partisipatif.

Model Co-Production Ideal

Model ini melihat dari bagaimana pola interaksi, hambatan, peluang, harapan masyarakat terutama pengunjung Taman TVRI Kota Palembang dalam mewujudkan model pengelolaan fasilitas publik melalui model *Co-Production* yang optimal. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait dimensi tersebut termuat pada diagram di bawah ini :



Gambar 6. Model Co-Production Ideal

Berdasarkan hasil diagram, mayoritas responden yaitu sebesar 71% (gabungan antara 22,6% sangat setuju dan 48,4% setuju) menilai bahwa model pengelolaan bersama antara pemerintah dan masyarakat akan lebih efektif dibandingkan jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Hal ini menunjukkan adanya dukungan

kuat terhadap penerapan model *co-production* dalam pengelolaan fasilitas publik di Taman Kota TVRI. Model *co-production ideal* menekankan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam setiap tahap pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga pengawasan. Hasil dari respon masyarakat tersebut telah menandakan bahwa terdapat potensi interaksi yang positif antara pihak-pihak tersebut, di mana pemerintah berperan sebagai penyedia kebijakan dan fasilitas, masyarakat sebagai pelaksana dan pengawas, serta sektor swasta sebagai pendukung sumber daya melalui program CSR atau kegiatan sosial.

Dukungan kuat dari 71% masyarakat terhadap pengelolaan Taman TVRI Kota Palembang juga menjadi harapan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang aman dan inklusif sehingga sangat efektif apabila diterapkannya model kolaborasi ideal yang berbasis pada prinsip *Adaptive Collaborative Management* (ACM), sebuah pendekatan holistik yang menggabungkan manajemen adaptif untuk menangani ketidakpastian seperti degradasi fasilitas dan kolaborasi berbagi kekuasaan antaraktor untuk memastikan pembelajaran berkelanjutan (Pradana, 2024). Model ini dirancang khusus untuk mengatasi hambatan utama dalam studi kasus ini, yaitu koordinasi yang lemah antara pemerintah daerah sektor swasta melalui CSR, dan warga, serta rendahnya kepercayaan akibat kurangnya transparansi dan partisipasi yang terfragmentasi, yang sering kali menyebabkan tumpukan sampah, vandalisme, dan fasilitas rusak tanpa tindak lanjut cepat.

Namun, hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok kecil yang tidak setuju (12,9%) dan sangat tidak setuju (16,1%), yang menandakan masih terdapat hambatan dalam penerapan *co-production*. Hambatan tersebut dapat berupa kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas kolaborasi, serta terbatasnya kapasitas masyarakat dalam hal teknis pengelolaan taman. Meskipun demikian, melalui dukungan yang tinggi dari masyarakat membuka peluang besar untuk memperkuat pola pengelolaan kolaboratif, seperti kegiatan gotong royong, program taman asuh, atau pelibatan komunitas lokal dalam pemanfaatan dan pengawasan fasilitas taman. Harapannya melalui model ini pengelolaan taman publik TVRI tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan bersifat partisipatif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah sebagai fasilitator kebijakan, masyarakat sebagai penggerak partisipasi, dan pihak swasta sebagai penyedia dukungan sumber daya, Taman Kota TVRI dapat menjadi contoh penerapan *model co-production ideal* yang efektif. Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu menciptakan rasa memiliki bersama terhadap fasilitas publik, memperkuat keberlanjutan taman, serta meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil laporan yang telah dilakukan oleh tim penulis, maka didapatkan kesimpulan akhir bahwa Taman Publik POM IX di Palembang belum menerapkan model *Co-Production* Elinor Ostrom yang tercermin dari persepsi masyarakat terhadap ruang publik di kota tersebut dengan sekitar 80,7% responden menyatakan ketidakpuasan akibat minimnya pemeliharaan rutin dan kurangnya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemeliharaan, serta pengawasan taman hanya mencapai 12,9% responden yang setuju, sementara lebih dari 80% dari 31 responden memberikan respons negatif berupa tidak setuju hingga sangat tidak setuju. Namun, terdapat dukungan kuat dari mayoritas responden, yaitu sekitar 71% (terdiri dari 22,6% sangat setuju dan 48,4% setuju), yang menilai bahwa model pengelolaan bersama atau *co-production* antara pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih efektif dibandingkan pengelolaan unilateral oleh pemerintah saja, sebagaimana dapat diterapkan pada fasilitas publik seperti Taman TVRI Kota Palembang. Oleh karena itu, secara praktis, diperlukan rekomendasi kebijakan yang jelas berupa alokasi anggaran rutin untuk pemeliharaan, penguatan insentif *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi sektor swasta, serta program partisipatif berkelanjutan seperti *adopt-a-park* guna mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga dan mengembangkan ruang publik secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya Universitas Sriwijaya yang telah memberikan fasilitas akademik, pelatihan serta peningkatan kemampuan penulis dalam setiap program. Kepada semua pihak civitas akademika Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam penyelesaian artikel ini dari pengumpulan data hingga penyusunan artikel, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bimbingan, dan kontribusi yang diberikan. Tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, artikel ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dalam upaya memajukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. (2021). Evaluasi Kualitas Ruang Terbuka Publik Menggunakan Good Public Space Index Di Kota Palembang. *Jurnal Desiminasi Teknologi*, 9(2).
- Amalia, F., Lussettyowati, T., & Prima, L. (2023). Program Pendampingan Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Perancangan Ruang Terbuka Publik (Kawasan 3-4 Ulu Palembang). *Jurnal Pengabdian Community*, 5(1), 26-36.
- Aiyub, M., Winarty, A., & Jamal, S. (2025). *Jurnal Pendidikan Indonesia : Peranan Sekolah Untuk Meningkatkan Civic Education Berdasarkan Nilai Pancasila Pada SMA Di Kecamatan Idi Rayeuk*. 5(5). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i5.2039>
- Arung, H. T., Widyastomo, D., Lamba, M. A., & Jayapura, U. C. (2025). *Perancangan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan (Studi Kasus : Taman Mandiri Kota Jayapura)*. 3, 168–181.
- Diana, I., & Wijayanti, S. (2022). ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA PELAYANAN RAWAT INAP DI RSUD WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Fahham, A. M. (2017). *Tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapannya pada perusahaan di indonesia*. 111–119.
- Kebijakan, F., Rth, P., & Daerah, D. I. (2009). *MENURUT UU NO . 26 / 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN*. 26, 13–23.
- Madu, M. I., & Dimmera, B. G. (2023). *PENGLOLAAN TAMAN KOTA DAN PENANGGULANGAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKAYANG*. 1, 132–138.
- Marsela, A. R., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2025). *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Tematik di Kota Sukabumi*. 8, 374–390.
- Muhamad Afifuddin Nur, M. S. (2024). *PENGOLAHAN DATA*. *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknogi*, 2, 163–175.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Pradana, I. P. Y. B. (2024). *TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK*.
- Prasetyo, A. D. (2023). *Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik*. 2, 378–385.
- Robert, G., Davis, L. M., & Branch, C. (2021). *Applying Elinor Ostrom ' s Design Principles to Guide Co-Design in Health (care) Improvement : A Case Study with Citizens Returning to the Community from Jail in Los Angeles County*. 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.5334/ijic.5569>
- Rochmah, E., & Rosy, B. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dan Fasilitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat*. 10(1), 61–72.
- Siroj, R. A., Afgani, W., Septaria, D., Zahira, G., Kuantitatif, P., Ilmiah, P., & Data, A. (2024). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024 | 11279*. 7, 11279–11289.